



Perbandingan Sistem Administrasi Negara Tiongkok dan Yordania: Tinjauan Ideologi, Struktur, dan Modernisasi

Sri Yulianty Mozin¹, Alexander H. Badjuka², Nurferawati Ntelu³, Hadidjah Hasan⁴,
Vanda Imelda Patuti⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Adminisrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo

E-mail: yulmozin@ung.ac.id¹, abadjuka@ung.ac.id², nurferantelu@gmail.com³,
hadijahasan171@gmail.com⁴, vandaimelda05@gmail.com⁵

Article Info

Article history:

Received November 14, 2025

Revised November 18, 2025

Accepted November 21, 2025

Keywords:

Comparative Public
Administration, China, Jordan,
Party-State, Constitutional
Monarchy, Decentralization,
Five-Year Plans

ABSTRACT

This study analyzes the comparative administrative systems of China and Jordan based on their ideological backgrounds, governmental structures, political infrastructure, and the challenges of modernization they face. China exhibits a highly centralized party-state model under the control of the Chinese Communist Party (CCP), characterized as an authoritarian developmental state that prioritizes political stability over development. China's administrative legitimacy rests on successful economic development and party discipline. In contrast, Jordan is a constitutional monarchy that combines traditional monarchical legitimacy with modern democratic principles, creating a hybrid system in which the King holds strategic authority and the civil bureaucracy is influenced by Western influences. This analysis shows that China excels in centrally coordinated long-term planning through its Five-Year Plans, but faces criticism regarding limited public participation and human rights issues. Meanwhile, Jordan has been pursuing decentralization since 2015 to improve the responsiveness of public services, though it has been hampered by limited local capacity and regional pressures from the refugee influx. Both countries are also actively pursuing administrative digitalization; China's focus is on social control and policy integration, while Jordan's focus is on service efficiency with support from international donors. This comparison confirms that there is no universal administrative model, and each country adapts its system to meet the needs of stability, development, and its political values.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received November 14, 2025

Revised November 18, 2025

Accepted November 21, 2025

Kata Kunci:

Administrasi Publik
Komparatif, Tiongkok,
Yordania, Party-State, Monarki

ABSTRACT

Studi ini menganalisis perbandingan sistem administrasi negara Tiongkok dan Yordania berdasarkan latar belakang ideologi, struktur pemerintahan, infrastruktur politik, serta tantangan modernisasi yang dihadapi. Tiongkok menampilkan model party-state yang sangat terpusat di bawah kendali Partai Komunis Tiongkok (PKT), dicirikan sebagai authoritarian developmental state yang mengutamakan stabilitas politik untuk pembangunan. Legitimasi administrasi Tiongkok bersandar pada keberhasilan pembangunan ekonomi dan disiplin partai. Sebaliknya, Yordania merupakan monarki konstitusional yang memadukan legitimasi monarki tradisional dengan prinsip demokrasi modern, menciptakan hybrid system di



Konstitusional, Desentralisasi,
Five-Year Plans

mana Raja memegang otoritas strategis dan birokrasi sipil diwarnai pengaruh Barat. Analisis ini menunjukkan bahwa Tiongkok unggul dalam perencanaan jangka panjang yang terkoordinasi secara sentral melalui Five-Year Plans, namun menghadapi kritik terkait minimnya partisipasi publik dan isu hak asasi manusia. Sementara itu, Yordania berupaya menuju desentralisasi sejak 2015 untuk meningkatkan responsivitas layanan publik, meskipun terhambat oleh keterbatasan kapasitas lokal dan tekanan regional akibat gelombang pengungsi. Kedua negara juga aktif dalam digitalisasi administrasi; Tiongkok dengan fokus kontrol sosial dan integrasi kebijakan, sementara Yordania fokus pada efisiensi layanan dengan dukungan donor internasional. Perbandingan ini menegaskan bahwa tidak ada model administrasi universal, dan setiap negara menyesuaikan sistemnya dengan kebutuhan stabilitas, pembangunan, serta nilai politik yang dianut.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Sri Yulianty Mozin

Universitas Negeri Gorontalo

Email: yulmozin@ung.ac.id

PENDAHULUAN

Setiap negara di dunia memiliki sistem administrasi yang unik, dibentuk oleh dinamika sejarah, ideologi, budaya politik, serta struktur pemerintahan yang berlaku. Administrasi negara tidak hanya sekadar mekanisme teknis untuk mengimplementasikan kebijakan publik, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam menjaga legitimasi politik, stabilitas sosial, serta kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks studi administrasi publik komparatif, sistem administrasi suatu negara mencerminkan karakter dan orientasi kekuasaan yang berakar dari sejarah politik dan sosialnya. Melalui sistem administrasi, negara mengartikulasikan hubungan antara pemerintah dan rakyat, menyalurkan nilai-nilai ideologis, serta menetapkan arah pembangunan nasional.

Perbandingan sistem administrasi antarnegara menjadi penting untuk memahami bagaimana suatu bangsa mengelola kekuasaan, mengatur birokrasi, serta menyeimbangkan antara efisiensi, keadilan, dan legitimasi politik. Negara-negara dengan latar belakang ideologis yang berbeda sering menunjukkan pendekatan yang kontras dalam mengelola pemerintahan. Sebagai contoh, negara dengan ideologi sosialis cenderung menekankan pada sentralisasi kekuasaan dan perencanaan kolektif, sementara negara yang berakar pada sistem monarki atau demokrasi liberal lebih menonjolkan pembagian kekuasaan dan representasi politik.

Dalam konteks ini, membandingkan sistem administrasi negara Tiongkok dan Yordania menghadirkan dua model yang menarik dan kontras. Tiongkok dikenal sebagai negara dengan ideologi komunisme dan sistem pemerintahan yang sangat tersentralisasi di bawah kendali Partai Komunis Tiongkok (PKT). Sistem ini mengedepankan prinsip kolektivitas, stabilitas politik, dan pembangunan ekonomi melalui perencanaan jangka panjang yang terstruktur.



Sebaliknya, Yordania menampilkan karakteristik hybrid system dalam bentuk monarki konstitusional yang berupaya memadukan tradisi monarki Hashemite dengan nilai-nilai demokrasi modern. Raja Yordania tetap menjadi pusat kekuasaan dan simbol persatuan nasional, sementara lembaga-lembaga pemerintahan lainnya menjalankan fungsi administratif yang dipengaruhi oleh sistem Barat dan nilai-nilai lokal.

Dengan demikian, kajian perbandingan antara sistem administrasi Tiongkok dan Yordania tidak hanya memperlihatkan perbedaan dalam struktur birokrasi dan pola kekuasaan, tetapi juga menggambarkan bagaimana ideologi dan konteks politik membentuk cara negara mengelola pemerintahan dan pelayanan publik. Analisis ini memberikan wawasan penting tentang variasi praktik administrasi di tingkat global serta implikasinya terhadap efektivitas dan legitimasi pemerintahan di kedua negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi komparatif (*comparative public administration approach*) yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam perbedaan dan persamaan sistem administrasi negara Tiongkok dan Yordania. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami bagaimana konteks ideologis, politik, dan struktural memengaruhi desain serta kinerja administrasi publik di kedua negara. Melalui analisis lintas negara, penelitian ini berupaya mengidentifikasi pola-pola umum dalam praktik administrasi serta menemukan karakteristik khas yang dipengaruhi oleh faktor sejarah, budaya politik, dan sistem pemerintahan masing-masing negara.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena administrasi negara secara sistematis dan kontekstual. Pendekatan kualitatif dipilih karena lebih mampu menjelaskan makna di balik struktur birokrasi, ideologi politik, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang tidak dapat diukur secara numerik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek formal dari sistem administrasi, tetapi juga menafsirkan dinamika sosial dan politik yang membentuk praktik pemerintahan di Tiongkok dan Yordania.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran berbagai sumber ilmiah dan dokumen resmi. Sumber data tersebut meliputi literatur akademik, hasil penelitian terdahulu, buku-buku ilmiah, jurnal nasional dan internasional, laporan kebijakan, publikasi lembaga internasional seperti World Bank, UNDP, dan OECD, serta dokumen pemerintah yang menjelaskan tentang ideologi, struktur kelembagaan, mekanisme perencanaan, dan tantangan administrasi di masing-masing negara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah berbagai sumber tertulis untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang sistem administrasi negara yang menjadi objek kajian.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis komparatif kualitatif (*qualitative comparative analysis*). Proses analisis meliputi tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk menyaring dan mengelompokkan informasi penting dari berbagai sumber agar lebih terarah pada fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk deskripsi naratif yang membandingkan sistem administrasi Tiongkok dan Yordania secara tematik berdasarkan dimensi ideologi,



struktur kelembagaan, mekanisme perencanaan kebijakan, serta tantangan kontemporer. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi pola-pola umum, titik perbedaan, dan implikasi dari kedua sistem administrasi tersebut terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan publik.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana perbedaan ideologi dan sistem politik—antara Tiongkok yang menganut model party-state otoriter dan Yordania yang menerapkan monarki konstitusional hybrid—mempengaruhi karakter birokrasi, pola pengambilan keputusan, serta efektivitas implementasi kebijakan publik di masing-masing negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Administrasi Negara Tiongkok

a. Ideologi dan Karakter Sistem

Administrasi Tiongkok didasarkan pada model party-state, di mana Partai Komunis Tiongkok (PKT) merupakan pusat kendali politik dan administrasi. PKT tidak hanya menetapkan arah kebijakan, tetapi juga mengarahkan seluruh proses pemerintahan melalui pengisian posisi-posisi kunci dan mekanisme internal partai. Sejak 1949, ideologi Marxisme-Leninisme-Mao Zedong telah menjadi fondasi, yang kemudian diperbarui melalui teori-teori kepemimpinan berikutnya, seperti Xi Jinping Thought yang menekankan "kepemimpinan menyeluruh Partai" (the overall leadership of the Party) dalam setiap lini birokrasi dan organisasi masyarakat. Karakteristik kunci sistem ini adalah fokus pada perencanaan jangka panjang melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Five-Year Plans). Dokumen ini mengintegrasikan visi politik partai menjadi kebijakan konkret, melibatkan koordinasi ketat antara pusat dan daerah untuk menjaga konsistensi kebijakan secara nasional. Tiongkok menampilkan paradoks: sentralisasi politik yang kuat untuk memastikan kontrol, sekaligus fleksibilitas administratif terbatas untuk melakukan eksperimen kebijakan (pilot projects) di tingkat daerah sebelum diterapkan secara nasional.

b. Struktur Negara dan Pemerintahan

Secara formal, struktur pemerintahan Tiongkok meliputi Presiden (Kepala Negara), Dewan Negara (State Council—eksekutif tertinggi), dan Kongres Rakyat Nasional (National People's Congress/NPC—legislatif). Namun, dalam praktik, pengambilan keputusan strategis sangat didominasi oleh struktur PKT, khususnya Politbiro dan Komite Tetap Politbiro, yang menciptakan dualisme institusional antara birokrasi negara dan mekanisme internal partai.

Pada tingkat lokal, administrasi tersusun hierarkis, dari provinsi hingga desa. Di setiap level, aparat administrasi negara selalu paralel dengan struktur komite partai yang bertugas mengawasi dan memandu implementasi kebijakan. Struktur ini menghasilkan pola fragmented authoritarianism, yaitu adanya otonomi terbatas di tingkat bawah dalam kerangka kontrol politik pusat. Intrinsik pada struktur ini adalah karakter kombinasi sentralisasi politik dengan desentralisasi administratif terbatas, memungkinkan inovasi daerah yang terkelola.



c. Infrastruktur Politik yang Mendukung Administrasi

Infrastruktur politik Tiongkok sangat berlapis: PKT sebagai pusat kendali strategis, lembaga negara formal, dan organisasi massa (seperti Federasi Wanita Seluruh Tiongkok) yang menjembatani negara dan masyarakat untuk membina dukungan sosial dan menyosialisasikan program pemerintah.

d. Modernisasi administrasi melalui digitalisasi (e-government dan big data) menjadi pilar kontemporer. Sistem ini meningkatkan efisiensi dan memperkuat kapasitas monitoring negara, namun menimbulkan perdebatan serius terkait privasi dan kontrol sosial, memperlihatkan paradoks: peningkatan transparansi administratif dengan penguatan mekanisme kontrol negara. Selain itu, kampanye anti-korupsi berskala besar sejak 2012 telah menjadi instrumen utama penguatan disiplin dan legitimasi PKT, meskipun juga memicu perilaku birokrat yang terlalu berhati-hati (risk-averse behavior), yang berpotensi memperlambat inovasi kebijakan.

e. Tantangan utama administrasi Tiongkok meliputi

Ketimpangan Regional: Kesenjangan pembangunan antara wilayah pesisir timur yang maju dan daerah pedalaman yang tertinggal menimbulkan implikasi serius bagi stabilitas politik dan memicu migrasi besar-besaran

f. Partisipasi Publik Terbatas: Ruang partisipasi

Masyarakat sipil independen masih sangat dibatasi regulasi. Sistem administrasi Tiongkok cenderung mengedepankan responsive authoritarianism, yaitu pemerintah bersedia merespons aspirasi masyarakat selama tidak mengancam legitimasi partai.

g. Kontrol Digital: Pemanfaatan Social Credit System dan teknologi big data memperluas kapasitas pengawasan massal negara, menciptakan dilema antara modernisasi birokrasi dan kontrol politik yang ketat.

2. Sistem Administrasi Negara Yordania

a) Bentuk Negara dan Karakter Sistem

Yordania adalah monarki konstitusional yang dipimpin oleh Dinasti Hashemite. Raja memiliki peran sentral dan otoritas luas, termasuk dalam pengangkatan Perdana Menteri dan memengaruhi proses legislasi, menciptakan perpaduan unik antara legitimasi tradisional dan struktur modern. Sistem administrasi Yordania adalah hybrid system, menekankan stabilitas politik dan kontinuitas kebijakan melalui koordinasi antara eksekutif, legislatif, dan istana.

Model ini berkembang sebagai respons untuk memadukan norma historis dengan institusi formal, di mana Raja berfungsi sebagai pengendali utama keseimbangan antara kepentingan elite dan aspirasi masyarakat. Modernisasi administrasi difokuskan pada penguatan efektivitas pemerintahan lokal, koordinasi, dan pengembangan sistem digital.

b) Struktur pemerintahan

Raja berperan sebagai kepala negara, simbol persatuan, dan titik sentral legitimasi politik. Raja mengangkat Perdana Menteri dan Dewan Menteri, yang menjalankan kebijakan administratif sehari-hari namun tetap bergantung pada mandat dan arahan Raja. Parlemen terdiri dari Majelis Deputi (dipilih rakyat) dan Majelis Senat (diangkat Raja). Meskipun parlemen memiliki fungsi legislasi, peran strategisnya dibatasi oleh pengaruh Raja dan kabinet.



c) Infrastruktur Politik yang Mendukung Administrasi

Infrastruktur politik Yordania mencakup kementerian, parlemen dua kamar, sistem yudisial, partai politik, dan organisasi masyarakat sipil. Sejak tahun 2015, Yordania telah melakukan reformasi signifikan menuju desentralisasi melalui Undang-Undang Desentralisasi 2015. Reformasi ini bertujuan memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi, mendekatkan pengambilan keputusan kepada warga, dan memperkuat partisipasi lokal. Selain itu, administrasi Yordania sangat bergantung pada donor internasional (World Bank, OECD, UNDP) untuk dukungan teknis dan finansial dalam program modernisasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik.

d) Tantangan struktural Yordania meliputi

Keterbatasan Sumber Daya: Kekurangan sumber daya alam, terutama energi dan air, memaksa pemerintah bergantung pada bantuan internasional dan menuntut perencanaan administratif yang inovatif dan cermat.

Tekanan Pengungsi Regional: Gelombang pengungsi Suriah memberikan tekanan luar biasa pada layanan publik (kesehatan, pendidikan, infrastruktur) dan anggaran, menuntut keseimbangan antara kebutuhan warga lokal dan pengungsi.

Kapasitas Birokrasi Lokal: Implementasi desentralisasi terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia terlatih, pengalaman teknis, dan pendanaan yang memadai di tingkat daerah.

Ketergantungan Internasional: Ketergantungan pada dukungan donor menimbulkan tantangan keberlanjutan reformasi jika dukungan finansial berkurang

e) Perbandingan Sistem Administrasi dan Implikasi Kebijakan

Aspek Perbandingan	Tiongkok	Yordania
Bentuk Negara/Karakter Sistem	Party-State, Authoritarian Developmental State	Monarki Konstitusional, Hybrid System
Sumber Legitimasi Utama	Partai Komunis Tiongkok (PKT), Stabilitas Politik, Pembangunan Ekonomi	Monarki Hashemite (Tradisional), Struktur Pemerintahan Modern (Parlemen)
Struktur Kekuasaan	Sangat Sentralistik, dengan ruang eksperimen kebijakan daerah terbatas	Bergerak ke Desentralisasi, namun kontrol strategis tetap di Istana/Pusat
Perencanaan Khas	Five-Year Plans (Jangka Panjang, Komprehensif)	Reformasi Administrasi dan Pembangunan Berbasis Kebutuhan Stabilitas dan Dukungan Donor
Fokus Digitalisasi	Integrasi Layanan Publik, Manajemen Kependudukan, dan Kontrol Sosial (Social Credit System)	Efisiensi Layanan Publik dan Transparansi, Didukung Donor Internasional



f) Implikasi Kebijakan untuk Negara Berkembang (Contoh Indonesia):

Konsistensi Perencanaan Jangka Panjang: Dari Tiongkok, Indonesia dapat mengambil pelajaran tentang pentingnya konsistensi perencanaan jangka panjang dan koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah untuk mencegah ketimpangan kebijakan dan mencapai target pembangunan ambisius.

Keseimbangan Stabilitas dan Akuntabilitas: Pengalaman Tiongkok juga mengingatkan bahwa sentralisasi yang kuat harus diimbangi dengan pengawasan internal dan mekanisme pertanggungjawaban yang kuat agar legitimasi terjaga.

Penguatan Kapasitas Lokal: Dari Yordania, ditekankan bahwa keberhasilan desentralisasi sangat bergantung pada kapasitas keuangan dan sumber daya manusia di tingkat lokal. Peningkatan kompetensi birokrasi lokal dan dukungan infrastruktur administrasi harus mendahului transfer tanggung jawab besar.

KESIMPULAN

Tiongkok dan Yordania menyajikan dua model administrasi negara yang kontras. Tiongkok, sebagai party-state yang sentralistik, mampu melakukan mobilisasi sumber daya dan implementasi kebijakan jangka panjang (Five-Year Plans) secara efektif berkat integrasi penuh antara PKT dan negara. Namun, model ini terbatas dalam partisipasi publik dan rentan terhadap isu hak asasi manusia. Yordania, sebagai monarki konstitusional hybrid, berupaya menyeimbangkan legitimasi tradisional dengan modernisasi melalui reformasi desentralisasi sejak 2015. Meskipun demikian, upaya ini dibebani oleh keterbatasan kapasitas lokal dan tekanan regional (pengungsi Suriah), menjadikan stabilitas dan keberlanjutan reformasi sangat bergantung pada penguatan kapasitas lokal dan dukungan koordinasi. Kedua negara memiliki kebutuhan universal akan modernisasi administrasi (efektivitas, responsivitas, dan akuntabilitas), namun solusi dan prioritasnya berbeda, dipengaruhi oleh ideologi, kapasitas, dan konteks politik masing-masing.

SARAN

1) Bagi Negara yang Menerapkan Perencanaan Pembangunan Terpusat:

Penting untuk memadukan konsistensi perencanaan jangka panjang dengan penguatan mekanisme akuntabilitas dan transparansi, belajar dari pengalaman Tiongkok di mana sentralisasi harus diimbangi pengawasan agar tidak mengabaikan ruang partisipasi publik.

2) Bagi Negara yang Menerapkan Desentralisasi:

Keberhasilan transfer kewenangan administratif sangat bergantung pada penguatan kapasitas keuangan dan sumber daya manusia di tingkat lokal, sebagaimana ditekankan oleh pengalaman Yordania. Keterlibatan lembaga internasional dapat membantu dalam pelatihan dan evaluasi kinerja untuk menjamin reformasi yang berkelanjutan.

3) Bagi Modernisasi Administrasi (Digitalisasi):

Setiap program e-government harus mengintegrasikan penerapan aturan perlindungan data, transparansi, dan mekanisme pengawasan yang jelas untuk mencegah risiko pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data, sekaligus memastikan hak-hak publik terlindungi.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khazaaleh, M. (2020). *The Hashemite Monarchy and Political Legitimacy in Jordan*. Amman: Jordan Center for Strategic Studies.
- Al-Khazaaleh, M., & Bataineh, L. (2023). Public Administration Reform in Jordan: Challenges and Prospects. *Journal of Middle Eastern Public Policy*, 12(2), 45-62.
- Chen, J., & Qian, L. (2022). *Digital Governance and Public Administration in China: Opportunities and Risks*. Beijing: China Social Sciences Press.
- Christensen, T., & Lægreid, P. (2022). Authoritarian States and Public Administration: The Case of China. *International Review of Administrative Sciences*, 88(4), 765-783.
- Guo, S., & Chen, H. (2021). Party-State Relations and Institutional Dualism in China. *Journal of Chinese Political Science*, 26(1), 13-29.
- He, B., & Warren, M. (2021). Responsive Authoritarianism in China: Institutions and Public Engagement. *Governance*, 34(3), 557-574.
- Huang, Y., & Sun, W. (2023). Anti-Corruption Campaigns and Bureaucratic Behavior in China. *Asian Journal of Political Science*, 31(1), 78-95.
- Li, J. (2021). Civil Society and Political Participation in Contemporary China. *Journal of Contemporary Asia*, 51(5), 695-713.
- Li, Y., & Xu, Z. (2021). Regional Inequality and Public Administration in China. *Economic and Political Studies*, 9(4), 522-540.
- OECD. (2021). *Public Governance Reform in Jordan*. Paris: OECD Publishing.
- OECD & World Bank. (2021). *Decentralization and Local Governance in Jordan*. Washington, DC: World Bank.
- UNDP. (2022). *Jordan Human Development Report: Responding to the Refugee Crisis*. New York: UNDP.
- Wu, X. (2022). Fragmented Authoritarianism and Local Governance in China. *China Information*, 36(2), 123-146.
- Zhang, L. (2020). Mass Organizations and State-Society Relations in China. *Journal of Contemporary China*, 29(125), 201-219.8
- Zhou, Y., & Tan, X. (2023). Five-Year Plans and Policy Implementation in China. *Chinese Public Administration Review*, 14(1), 55-72.